



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

Topik: Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Senin, 3 September 2018

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat DH-04

2. Pimpinan Rapat : Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PPN/Bappenas

3. Peserta Rapat :

1. Biro Perencanaan dan Data, KPU
2. Tim Satu Data Indonesia, KSP
3. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
4. National Democratic Institute
5. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L
3. Tujuan dari renaksi ini adalah mendorong transparansi proses penyelenggaran pemilu dan mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh KPU dalam portal satu data sehingga dapat diakses oleh publik.
4. Menurut Perludem, KPU memiliki data yang cukup banyak dan detail, khususnya data tentang penyelenggaraan pemilu dari kabupaten hingga provinsi. Selain itu, data tersebut telah dipublikasikan melalui portal informasi pemilu. Namun, masyarakat masih merasa sulit dalam

mengakses, karena format data tidak dalam bentuk terbuka dan belum banyak data yang diupdate secara berkelanjutan.

5. Selain itu, pelaksanaan pemilu di Indonesia cukup kompleks dan pada proses penyelenggaraan juga masih bersifat manual. Pada saat yang sama dibutuhkan kecepatan dan penggunaan teknologi, khususnya merekap dokumen C1. Sebelumnya teknologi rekap secara elektronik ini ujicoba untuk pileg, namun belum optimal.
6. Portal Satu Data Indonesia yang dimandatkan dalam Perpres secara khusus mewajibkan Kementerian/ Lembaga untuk menintegrasikan datanya dalam format satu data. Namun, untuk KPU karena termasuk sebagai lembaga Negara yang indenpenden, Satu Data Indonesia dapat mendorong format data dan integrasi pakai bagi data-data tersebut dan tidak bersifat wajib.
7. Sehubungan dengan tidak hadirnya institusi teknis, maka tim dari biro perencanaan akan melaporkan hasil pertemuan hari ini kepada pimpinan.
8. Pada tahapan selanjutnya, perlu untuk dilakukan pertemuan bilateral lanjutan untuk membahas tentang subtansi terkait dengan integrasi data dan juga proses e-recap. Selain itu, terkait integrasi data harapannya KPU dapat menjadwalkan pertemuan dengan Komisioner beserta jajaranya untuk dapat mengikuti presentasi terkait dengan integrasi data ini.
9. Pertemuan tindaklanjut ini harapannya dapat diselenggarakan pada minggu depan.

Notula Rapat

Tities Eka A.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Latar Belakang :

Data penyelenggaraan pemilu yang cukup kaya belum dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat proses penyelenggaraan pemilu yang masih manual sehingga perlu untuk didorong dalam sebuah sistem yang elektronik.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1. Terciptanya transparansi data kepiluan 2. Tersedianya platform E-Rekap <i>beta</i>	1. Terintegrasinya data penyelenggaraan pemilu pada portal satu data 2. Tersedianya perencanaan (<i>roadmap</i>) pengembangan e-rekap yang terdiri dari studi kelayakan dan berbagai kebutuhan teknis lainnya 3. 3. Tersedianya platform e-rekap <i>beta</i> yang dapat diujicobakan di daerah	Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI	1. Kantor Staf Presiden 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 3. Kementerian Dalam Negeri 4. 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi